

## Strategi Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikultural

\*Mikraj Mikraj<sup>1</sup>, Khairil Fazal<sup>2</sup>, Muhammad Chaizir<sup>2</sup>

<sup>1-3</sup> Sekolah Tinggi Iskandar Thani Banda Aceh, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: [Mikrajstiei@gmail.com](mailto:Mikrajstiei@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze strategies for strengthening the values of religious moderation through a multicultural education approach. Religious moderation is viewed as a crucial effort to maintain social harmony within a pluralistic society, while multicultural education serves as an effective medium to systematically instill these values in students from an early age. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through an extensive review of relevant literature, including books, peer-reviewed journals, educational policy documents, and reports from educational institutions. The findings reveal that the reinforcement of moderation values can be achieved through the integration of tolerance and diversity into the curriculum, strengthening the role of teachers as agents of change and facilitators of inclusion, and fostering a school culture that embraces differences. However, the implementation process faces several challenges, such as ideological resistance rooted in exclusive religious interpretations, structural limitations within the education system, and cultural resistance from communities. On the other hand, opportunities arise from supportive government policies, curriculum flexibility, active involvement of civil society, and the strategic use of technology to promote the values of religious moderation.

**Keywords:** *Religious Moderation, Value Reinforcement, Multicultural Education*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendekatan pendidikan multikultural. Moderasi beragama dipandang sebagai upaya merawat harmoni sosial dalam masyarakat majemuk, sedangkan pendidikan multikultural menjadi medium efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara sistematis kepada peserta didik sejak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui telaah berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta laporan program dari lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan nilai moderasi dapat dilakukan melalui integrasi nilai toleransi dan keberagaman dalam kurikulum, penguatan peran guru sebagai agen perubahan dan fasilitator inklusi, serta pembentukan budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Namun, proses implementasi tidak lepas dari tantangan, antara lain hambatan ideologis yang bersumber dari paham keagamaan eksklusif, kendala struktural dalam sistem pendidikan, serta resistensi kultural dari masyarakat. Di sisi lain, peluang hadir melalui dukungan kebijakan pemerintah, fleksibilitas kurikulum, pelibatan masyarakat sipil, dan pemanfaatan teknologi dalam kampanye nilai-nilai moderasi.

**Kata kunci:** *Moderasi Beragama, Penguatan, Pendidikan Multikultural*

\*\*\*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini sejatinya menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa yang inklusif dan harmonis. Namun, dalam kenyataannya, perbedaan tersebut kerap kali menjadi sumber gesekan sosial, terutama ketika disertai dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan kaku. Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya gejala intoleransi, ujaran kebencian berbasis agama, serta radikalisme di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan, menjadi perhatian serius berbagai pihak (Suharsono, 2017). Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi konsep penting yang perlu terus disuarakan dan ditanamkan sejak dini. Moderasi beragama bukan berarti mengaburkan ajaran agama, melainkan memahami dan mengamalkan agama dengan cara yang seimbang, toleran, dan tidak ekstrem. Nilai-nilai seperti menghargai perbedaan, menghindari kekerasan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan menjadi inti dari moderasi tersebut (Santoso et al., 2022).

Salah satu pendekatan strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama adalah melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berupaya membentuk cara pandang peserta didik agar mampu hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Dalam lingkungan yang heterogen seperti Indonesia, pendidikan yang memperkuat kesadaran terhadap keberagaman menjadi sangat relevan dan mendesak (Sipuan et al., 2022). Melalui pendekatan multikultural, peserta didik tidak hanya diajak mengenali perbedaan, tetapi juga diajarkan bagaimana menyikapinya secara bijak dan terbuka. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam beragama dan berinteraksi dalam masyarakat plural. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendidikan multikultural dapat menjadi medium yang efektif dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara luas (Liata & Fazal, 2021).

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) (Danandjaja, 2014). Kajian ini dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik bersifat konseptual maupun empiris. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan

meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta regulasi terkait pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji pemikiran-pemikiran para ahli mengenai konsep moderasi beragama dan pendidikan multikultural, serta mengidentifikasi titik temu antara keduanya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini tidak hanya membandingkan teori, tetapi juga mengelaborasi bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diinternalisasikan melalui praktik pendidikan yang multikultural.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi. Tidak hanya dalam aspek suku, budaya, dan bahasa, tetapi juga dalam agama dan keyakinan. Di tengah keberagaman ini, semangat untuk hidup berdampingan secara damai menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika perbedaan keyakinan dibenturkan secara sempit dalam ruang sosial dan politik (Mawardi et al., 2024). Dalam situasi seperti inilah, konsep moderasi beragama menemukan relevansi dan urgensi yang sangat tinggi. Secara sederhana, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara beragama yang tidak ekstrem tidak terlalu keras (radikal) dan tidak terlalu longgar (liberal). Moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan cara pandang dan sikap dalam beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan toleransi (Mawardi et al., 2024). Dalam tradisi Islam, misalnya, konsep ini merujuk pada prinsip *ummatan wasathan* (umat yang tengah-tengah), sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an. Konsep ini sejatinya juga sejalan dengan ajaran agama-agama lain yang menekankan nilai kasih sayang, hidup damai, dan menghargai perbedaan (Fazal & Saleh, 2022).

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan menjadi kebutuhan sosial yang sangat mendasar. Sejak reformasi 1998, kebebasan beragama dan berekspresi mendapatkan ruang yang lebih luas. Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula berbagai kelompok yang menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk menyebarkan paham kebencian, mengkafirkan pihak lain, atau bahkan menghalalkan kekerasan atas nama agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa

kebebasan tanpa diimbangi dengan kedewasaan dalam beragama dapat menjadi sumber konflik yang serius.

Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi semacam penyeimbang dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya menjadi benteng terhadap radikalisme (Rambe et al., 2023), tetapi juga menjadi dasar untuk membangun kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu agenda strategis nasional, khususnya dalam sektor pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Kementerian Agama (Yusuf & Mutiara, 2022), misalnya, telah mengarusutamakan moderasi beragama dalam berbagai program, termasuk pelatihan bagi guru dan penyuluh agama, pengembangan kurikulum pendidikan agama, hingga penguatan institusi keagamaan yang toleran.

Namun, mewujudkan moderasi beragama di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. *Pertama*, masih adanya pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif di kalangan sebagian masyarakat. Ini sering kali dipengaruhi oleh doktrin yang tidak seimbang atau literasi keagamaan yang terbatas. *Kedua*, dinamika politik identitas yang memanfaatkan isu agama sebagai alat mobilisasi massa. Ketika agama dijadikan alat politik, maka potensi penyimpangan terhadap esensi ajaran agama menjadi sangat besar. *Ketiga*, pengaruh media sosial yang menjadi ruang bebas bagi penyebaran paham intoleran tanpa filter yang memadai (Rambe, 2017).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan menjadi kunci utama. Moderasi beragama tidak bisa hanya disuarakan sebagai slogan, tetapi harus ditanamkan sejak dini melalui sistem pendidikan yang komprehensif dan kontekstual. Pendidikan agama di sekolah, misalnya, perlu dikembangkan tidak hanya sebagai pengajaran ritual, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk cara berpikir yang terbuka, kritis, dan penuh empati terhadap perbedaan. Di sinilah pentingnya integrasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan keagamaan (Anwar, 2022). Selain pendidikan, peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting. Mereka adalah figur yang sering menjadi rujukan umat dalam memahami ajaran agama. Bila para tokoh ini konsisten menyuarakan dan memberi contoh hidup keberagaman yang damai, maka masyarakat pun akan lebih mudah menerimanya. Media juga tidak kalah pentingnya. Penyajian konten keagamaan yang

mendidik, sejuak, dan mencerdaskan akan menjadi penyeimbang terhadap narasi-narasi ekstrem yang kerap beredar di ruang digital.

Moderasi beragama di Indonesia adalah ikhtiar untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Ia bukan upaya menyeragamkan keyakinan, tetapi justru cara untuk menjamin bahwa setiap pemeluk agama dapat menjalankan keyakinannya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain (Susanto & Ulfah, 2022). Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keberagaman adalah kenyataan, bukan pilihan. Maka yang bisa dan harus dilakukan adalah mengelola keberagaman itu secara bijak, dan moderasi beragama adalah salah satu jalannya.

## **2. Pendidikan Multikultural dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Salah satu cara penting untuk menjaga harmoni dalam keberagaman tersebut adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan yang bersifat multikultural. Pendidikan multikultural bukan sekadar mengenalkan peserta didik pada keberagaman budaya atau identitas, melainkan membentuk cara pandang yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Hermanto, 2020), pendidikan multikultural seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, baik secara formal maupun non-formal.

Dalam praktiknya, pendidikan multikultural berarti menanamkan nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Peserta didik diajak untuk menyadari bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang plural, dan oleh karena itu mereka harus mampu hidup berdampingan dengan orang yang berbeda latar belakang. Ini bukan hanya menyangkut soal perbedaan agama atau suku, tetapi juga perbedaan pendapat, cara hidup, dan pandangan dunia. Sistem pendidikan nasional Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fauziah & Masyithoh, 2023) menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai demokratis dan tanggung jawab sosial dalam tujuan tersebut sangat selaras dengan semangat pendidikan multikultural.

Namun, tantangan dalam implementasinya tidaklah kecil. Masih banyak praktik pendidikan di lapangan yang belum benar-benar menginternalisasikan semangat multikulturalisme. Buku pelajaran, misalnya, masih kerap menggunakan pendekatan mayoritas dan kurang memberi ruang pada narasi dari kelompok-kelompok minoritas. Di beberapa sekolah, masih ditemukan kasus diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap peserta didik yang berasal dari latar belakang berbeda. Selain itu, pendekatan pengajaran yang masih berpusat pada hafalan dan penyeragaman juga menjadi hambatan tersendiri. Pendidikan multikultural menuntut adanya ruang dialog dan pemikiran kritis, di mana peserta didik bisa berdiskusi, menyampaikan pandangan, serta belajar memahami sudut pandang orang lain. Untuk itu, guru memiliki peran penting. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi semua peserta didik untuk berekspresi dan dihargai.

Pendidikan multikultural juga sangat berkaitan erat dengan pembangunan karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik perlu dibiasakan untuk bekerjasama dalam kelompok yang beragam, menghargai teman yang berbeda keyakinan, dan bersikap adil terhadap siapa pun tanpa memandang latar belakangnya. Nilai-nilai ini bisa ditanamkan tidak hanya melalui pelajaran agama atau Pancasila, tetapi juga melalui semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler (Hakim, 2022). Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa tidak hanya belajar tentang tokoh nasional dari satu wilayah atau suku tertentu, tetapi juga mengenal kontribusi tokoh dari berbagai daerah. Dalam pelajaran seni dan budaya, siswa bisa diperkenalkan pada ragam tarian, musik, dan pakaian adat dari berbagai etnis di Indonesia. Pendekatan semacam ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman.

Selain di dalam kelas, lingkungan sekolah juga harus mencerminkan nilai-nilai multikultural. Sekolah seharusnya menjadi miniatur masyarakat ideal, tempat anak-anak belajar hidup bersama secara damai. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas diskriminasi, dan memberi ruang pada keberagaman untuk tumbuh dan dihargai. Pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan nyata dalam membangun bangsa yang adil dan damai. Dalam situasi sosial yang kerap diuji oleh polarisasi dan intoleransi, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang mampu

hidup rukun dalam perbedaan. Jika diterapkan secara konsisten, pendidikan multikultural akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk tetap bersatu dalam kebinekaan.

### **3. Strategi Penguatan Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikultural**

#### **a. Integrasi Kurikulum Berbasis Nilai Toleransi dan Keberagaman**

Pendidikan merupakan ladang subur untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, termasuk moderasi beragama. Salah satu pintu masuk yang paling strategis adalah melalui kurikulum. Kurikulum bukan sekadar kumpulan mata pelajaran, melainkan representasi nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada peserta didik (Pratyca et al., 2023). Untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada moderasi, perlu dilakukan integrasi nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran yang ada. Ini bukan berarti harus menciptakan mata pelajaran baru, tetapi lebih pada penyisipan nilai-nilai tersebut ke dalam pelajaran yang sudah ada.

Misalnya, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), nilai moderasi beragama bisa ditekankan melalui pengenalan konsep kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, pentingnya dialog lintas iman, serta penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Dalam mata pelajaran sejarah, guru bisa menceritakan bagaimana tokoh-tokoh bangsa seperti Gus Dur, atau KH Ahmad Dahlan, selalu menempatkan toleransi sebagai nilai utama dalam perjuangannya.

Lebih jauh, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa bisa diajak untuk menganalisis teks-teks naratif atau opini yang memuat isu-isu keberagaman dan kebhinekaan. Mereka dapat didorong untuk menulis esai reflektif yang mengeksplorasi pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda latar belakang agama atau budaya. Integrasi ini tidak terbatas pada jenjang tertentu. Di tingkat SD, misalnya, cerita-cerita rakyat yang mengajarkan toleransi (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022) dan kebersamaan bisa dijadikan bahan ajar. Di SMP dan SMA, diskusi tentang isu-isu sosial yang menyentuh aspek kerukunan antarumat beragama dapat dimasukkan ke dalam kegiatan proyek atau ekstrakurikuler. Kurikulum yang terintegrasi dengan nilai toleransi akan memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa bahwa keberagaman adalah bagian dari kekayaan bangsa. Ia bukan ancaman, melainkan aset yang harus dirawat bersama.

b. Peran Guru sebagai Agen Moderasi dan Fasilitator Inklusi

Guru bukan hanya pengajar. Ia adalah pendidik, pembimbing, bahkan teladan bagi murid-muridnya. Dalam konteks pendidikan multikultural dan moderasi beragama, guru memainkan peran yang sangat penting sebagai agen perubahan. Sebagai agen moderasi, guru harus memiliki wawasan keagamaan yang moderat. Ini artinya, ia tidak hanya memahami ajaran agamanya secara mendalam, tetapi juga mampu memandang perbedaan sebagai keniscayaan yang harus dihormati. Guru yang moderat tidak akan menyebarkan paham-paham intoleran di ruang kelas, melainkan membimbing siswa untuk berpikir terbuka dan kritis.

Sikap guru terhadap perbedaan sangat menentukan cara siswa bersikap. Ketika guru memperlihatkan sikap inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, maka siswa akan meneladani hal tersebut (Munawir et al., 2022). Guru yang merangkul semua murid tanpa memandang latar belakang agama mereka menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua. Selain itu, guru juga harus berperan sebagai fasilitator inklusi. Ini berarti guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang sehat, mendorong dialog lintas iman, dan mengajak siswa untuk saling mengenal satu sama lain lebih dalam.

Kelas yang inklusif adalah kelas yang memberi ruang bagi semua siswa untuk bersuara tanpa takut dihakimi. Untuk memperkuat peran ini, penting bagi guru mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Pelatihan tersebut bisa mencakup materi tentang pengenalan nilai-nilai moderasi, teknik mengelola kelas yang inklusif, serta pendekatan pedagogis yang menghargai perbedaan. Tidak kalah penting, guru juga perlu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Tanpa dukungan sistemik, guru akan sulit menjalankan perannya secara maksimal. Maka dari itu, penguatan kapasitas guru harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan secara keseluruhan.

c. Pengembangan Budaya Sekolah yang Mendukung Harmoni Antarumat Beragama

Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat hidup. Dalam keseharian, interaksi antar siswa dan warga sekolah menjadi bagian penting dalam pembentukan sikap dan karakter. Oleh karena itu, pengembangan budaya sekolah yang ramah terhadap perbedaan menjadi sangat penting. Budaya sekolah adalah cerminan nilai-nilai yang

dianut bersama oleh seluruh warga sekolah. Budaya ini bisa terlihat dari cara guru berinteraksi dengan siswa, cara siswa saling memperlakukan, peraturan yang berlaku, hingga simbol-simbol yang ada di lingkungan sekolah (Amelia & Ramadan, 2021). Untuk menciptakan budaya sekolah yang mendukung harmoni antarumat beragama, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan visi dan misi sekolah yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan. Visi ini tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan aktivitas nyata.

Misalnya, sekolah bisa mengadakan kegiatan rutin seperti doa bersama lintas agama dalam momen tertentu, memperingati hari besar keagamaan dari berbagai agama secara proporsional, serta menyelenggarakan dialog keagamaan antar siswa. Ini bisa menjadi sarana saling mengenal dan membangun empati. Selain itu, sekolah juga perlu menciptakan aturan yang melindungi siswa dari diskriminasi dan intoleransi. Setiap bentuk ujaran kebencian, pelecehan berbasis agama, atau tindakan eksklusif harus ditegaskan sebagai pelanggaran yang tidak ditoleransi.

Ruang-ruang ekspresi seperti mading, pojok literasi, atau forum diskusi siswa bisa dijadikan medium untuk menyuarakan nilai-nilai perdamaian dan keberagaman (Fitriya et al., 2021). Kegiatan seni dan budaya yang melibatkan semua latar belakang siswa juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan memperkecil sekat-sekat sosial. Lingkungan fisik sekolah pun bisa mendukung semangat ini. Simbol-simbol keberagaman, kutipan-kutipan tokoh lintas agama tentang kedamaian, dan dekorasi yang mencerminkan kebhinekaan bisa menjadi pengingat visual bahwa sekolah ini milik semua, bukan milik satu kelompok saja.

#### **4. Tantangan dan Hambatan dalam Menerapkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama**

##### **a. Hambatan Ideologis**

Salah satu tantangan utama datang dari perbedaan pemahaman ideologis mengenai ajaran agama itu sendiri. Sebagian kelompok atau individu masih memaknai ajaran agama secara eksklusif dan rigid, sehingga menolak gagasan moderasi yang dianggap melemahkan prinsip keimanan (Nurita, 2022). Pandangan semacam ini membuat mereka tidak terbuka pada perbedaan, bahkan memusuhi pemeluk agama lain atau aliran berbeda dalam agama yang sama. Dalam konteks ini, moderasi dianggap

sebagai bentuk kompromi yang tidak dibenarkan secara teologis, bukan sebagai sikap adil dan bijaksana (Aziz et al., 2023).

b. Resistensi Sosial dan Budaya

Di beberapa komunitas, nilai-nilai moderasi beragama sering kali berbenturan dengan norma atau budaya lokal yang bersifat eksklusif dan penuh prasangka terhadap kelompok luar. Pola pikir sektarian yang diwariskan secara turun-temurun dapat menjadi penghalang bagi upaya penanaman toleransi dan inklusivitas. Ketika masyarakat terbiasa hidup dalam lingkungan homogen dan tertutup, mereka cenderung memandang perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai kenyataan sosial yang harus dikelola dengan bijak.

c. Minimnya Literasi Keagamaan yang Komprehensif

Keterbatasan akses terhadap literasi keagamaan yang moderat dan kontekstual membuat sebagian masyarakat mudah terjebak pada tafsir-tafsir ekstrem. Kurangnya kemampuan untuk membedakan antara ajaran agama yang universal dan interpretasi sempit yang bersifat politis atau ideologis menjadikan sebagian individu mudah terpengaruh oleh narasi kebencian. Hal ini juga dipicu oleh kurangnya ruang dialog antaragama yang sehat dan terbuka.

d. Pengaruh Ekstremisme dan Radikalisme

Kelompok-kelompok ekstremis, baik yang berbasis agama maupun politik, menjadi ancaman nyata terhadap penerapan nilai moderasi. Mereka memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan propaganda intoleransi, mengkafirkan pihak lain, bahkan menghalalkan kekerasan atas nama agama. Penyebaran konten radikal di media sosial dan forum daring menasar kalangan muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, sehingga nilai-nilai moderasi yang diajarkan di sekolah sering kali kalah oleh pengaruh luar yang bersifat ekstrem.

e. Kendala Struktural di Dunia Pendidikan

Dalam lingkungan pendidikan, penerapan nilai-nilai moderasi masih menghadapi kendala struktural, seperti:

- 1) Kurikulum yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Nilai-nilai moderasi belum menjadi bagian utama dalam semua mata pelajaran dan sering kali hanya diajarkan secara tersirat dalam pendidikan agama atau PPKn.
- 2) Kurangnya pelatihan guru. Tidak semua guru memahami atau memiliki kapasitas untuk menjadi agen moderasi, karena belum dibekali dengan pelatihan khusus mengenai pendidikan multikultural dan moderasi beragama.
- 3) Beban administratif dan tekanan akademik. Guru dan sekolah lebih fokus pada pencapaian nilai akademis dan target kurikulum, sehingga aspek pembinaan karakter, termasuk moderasi, sering terabaikan.

f. **Minimnya Dukungan dari Lingkungan Keluarga dan Masyarakat**

Sekolah memang dapat menjadi ruang penanaman nilai, namun tanpa dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, nilai-nilai tersebut sulit tumbuh secara konsisten. Banyak anak yang mendapatkan pelajaran toleransi di sekolah, tetapi justru menyaksikan praktik diskriminasi atau ujaran kebencian di rumah atau tempat ibadah. Ketidakharmonisan nilai antara pendidikan formal dan lingkungan sosial menjadi penghalang serius bagi internalisasi moderasi.

g. **Politik Identitas dan Polarisasi Sosial**

Dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Politik identitas berbasis agama menciptakan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Ketika isu-isu keagamaan dipolitisasi, maka moderasi menjadi sulit ditegakkan karena kelompok-kelompok tertentu merasa diuntungkan dengan mempertajam perbedaan (Paralihan, 2019). Dalam situasi seperti ini, narasi persatuan, toleransi, dan inklusi sering kali kalah oleh kepentingan politik jangka pendek.

## **D. KESIMPULAN**

Penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan multikultural merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi yang mampu hidup rukun dalam keberagaman. Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan perbedaan agama, budaya, dan identitas, pendidikan menjadi ruang paling efektif untuk menanamkan sikap saling menghargai, menghormati keyakinan orang lain, serta menolak kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama tidak hanya soal posisi tengah dalam memahami ajaran, tetapi

mencerminkan cara pandang yang inklusif, adil, dan toleran. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui integrasi kurikulum yang memuat konten keberagaman, peran guru sebagai teladan dan fasilitator inklusi, serta penciptaan budaya sekolah yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga arena pembentukan karakter yang mencerminkan semangat hidup damai dalam masyarakat plural.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak lepas dari tantangan. Hambatan ideologis yang lahir dari pandangan keagamaan eksklusif, kendala struktural dalam sistem pendidikan, hingga resistensi kultural di masyarakat menjadi batu sandungan yang harus diatasi secara serius. Meski begitu, peluang tetap terbuka lebar. Dukungan kebijakan pemerintah, komitmen lembaga pendidikan, serta peran aktif masyarakat sipil memberi ruang untuk optimisme. Untuk itu, diperlukan sinergi antara semua pihak guru, orang tua, pemerintah, tokoh agama, dan komunitas dalam mewujudkan pendidikan yang ramah terhadap perbedaan. Dengan begitu, moderasi beragama bukan hanya wacana, tetapi menjadi sikap hidup yang tumbuh sejak dini, mengakar dalam sistem pendidikan, dan mewarnai wajah Indonesia sebagai bangsa yang damai, adil, dan beradab dalam keragaman.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M., & Ramadan, Z. H. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5548–5555. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1701>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Aziz, A. R. A., Rabi'ah, R., & Ihromi, I. (2023). Peluang dan Tantangan Moderasi Beragama di Era Digital. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(02), 64. <https://doi.org/10.61590/int.v1i02.90>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 52. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Fauziah, R. F., & Masyithoh, S. (2023). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Tadzkirah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 37–49. <https://doi.org/10.55510/tadzkirah.v6i1.207>
- Fazal, K., & Saleh, J. (2022). Ummatan Wasatan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M.

- Quraish Shihab. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Hakim, T. R. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membina Moderasi Kehidupan Beragama. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(4), 192–200. <https://doi.org/10.56916/ejip.v1i4.188>
- Hermanto, B. (2020). Perencanaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *FOUNDASIA*, 11(2). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>
- Liata, N., & Fazal, K. (2021). MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>
- Mawardi, M., Juwaini, J., & Fazal, K. (2024). RELIGIOUS TOLERANCE IN BANDA ACEH AND KEDIRI: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN DIGITAL SPACE. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 10(2), 183. <https://doi.org/10.29103/jsds.v10i2.18538>
- Munawir, M., Salsabila, Z. P., & Nisa', N. R. (2022). Tugas, Fungsi dan Peran Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 8–12. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.327>
- Nurita, C. (2022). UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PAHAM RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 316–327. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.134>
- Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi. *Aqlania*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>
- Pratycia, A., Dharma Putra, A., Salsabila, A. G. M., Adha, F. I., & Fuadin, A. (2023). Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 58–64. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Rambe, T. (2017). Implementasi Pemikiran A. Mukti Ali terhadap Problem Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 6(2), 104–116.
- Rambe, T., Mawardi, M., & Mayasari, S. (2023). Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Potret Kebijakan dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat di Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 214. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19826>
- Santoso, J., Saron, T. B., Sutrisno, S., & Putrawan, B. K. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 324–338. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.167>

- 
- Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsono, S. (2017). Pendidikan Multikultural. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3>
- Susanto, A., & Ulfah, M. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi pada Era Media Baru 5.0 di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 27–46. <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24507>
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1). <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>